

“Menyoal Transparansi Pengelolaan Pajak Negara, antara markus dan gayus”

Firdaus Ilyas
Indonesia Corruption Watch (ICW)
www.antikorupsi.org
Jakarta 1 Februari 2011

Catatan Penting

Kinerja Perpajakan :

- Penerimaan Pajak tahun 2009 lebih rendah dibandingkan tahun 2008, dari Rp.658 triliun (2008) turun menjadi Rp.622 triliun (2009) atau turun 5,5%,
- Kenaikan jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar pada Dirjen Pajak, dari 3.053.934 WP (2002) menjadi 15.910.000 (2009), atau mengalami kenaikan 5 kali lipat dalam 8 tahun,
- Dari realisasi penerimaan pajak, terjadi penurunan rasio penerimaan pajak (Tax Ratio) dari 14,0% (2008) menurun jadi 11,8% (2009),

Pengadilan Pajak :

- Kinerja pengadilan pajak selama tahun 2002 – 2009,
 - Total Keseluruhan berkas gugatan dan banding yang masuk ke pengadilan pajak sebanyak 22.249 berkas dimana hanya sebanyak 16.953 (76,2%) berkas gugatan/banding dapat diterima secara formal dan sisanya ditolak.
 - Dari 22.249 berkas, 19.589 merupakan berkas banding (88,5%) dan sisanya sebanyak 2.544 merupakan berkas gugatan.
 - Dari keseluruhan berkas yang diputus diantaranya sebanyak 13.672 putusan (81,0%) mengabulkan gugatan/banding WP atau surat keputusan DJP dibatalkan.

Catatan Penting (lanjutan)

Pidana Pajak :

- Berdasarkan laporan DJP, dari tahun 2007 – 2009 perkembangan penyidikan kasus pajak sebagai berikut (status hingga 31 Des 2009):
 - Jumlah Berkas yang sudah P-19 sebanyak 43 berkas dengan jumlah tersangka sebanyak 29 orang dan nilai kerugian negara sebesar Rp.1,575 triliun,
 - Jumlah berkas yang sudah P-21 sebanyak 52 berkas dengan jumlah tersangka sebanyak 50 orang dengan nilai kerugian negara mencapai Rp.974 miliar,
 - Jumlah berkas yang sudah divonis sebanyak 39 berkas dengan terdakwa sebanyak 40 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.852 miliar dan denda pidana sebesar Rp.755 miliar

Catatan penting Audit BPK terhadap Lapkeu Depkeu tahun 2008 :

- Penghapusan piutang pajak atau penihilan piutang pajak bersaldo negatif pada Ditjen Pajak tahun 2008 sebesar Rp1.212.631,43 juta, diantaranya sebesar Rp767.763,96 juta tidak dapat diyakini kewajarannya karena tidak didukung dengan sumber dokumen yang valid yang rinci (rincian terlampir).
- Piutang pajak DJBC sebesar Rp231,30 miliar dan piutang bukan pajak DJBC sebesar Rp50,45 miliar tidak didukung dokumen yang valid dan terinci.

Catatan Penting (lanjutan)

Perbedaan Jumlah penerimaan pajak :

Tahun 2008 :

- Penerimaan Perpajakan Yang Disajikan Dalam LKPP Berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU) Belum Seluruhnya Dapat Direkonsiliasi Dengan Data Penerimaan Menurut Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
 - Hasil rekonsiliasi antara data penerimaan menurut MPN dan data penerimaan menurut Kas Umum Negara pada Sistem Akuntansi Umum (SAU) menunjukkan adanya perbedaan data penerimaan yang dihasilkan oleh kedua sistem tersebut, yaitu terdapat 64.313 transaksi senilai Rp 2,99 triliun yang tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan 101.423 transaksi senilai Rp3,43 triliun yang tercatat di SAU tetapi tidak tercatat di SAI,

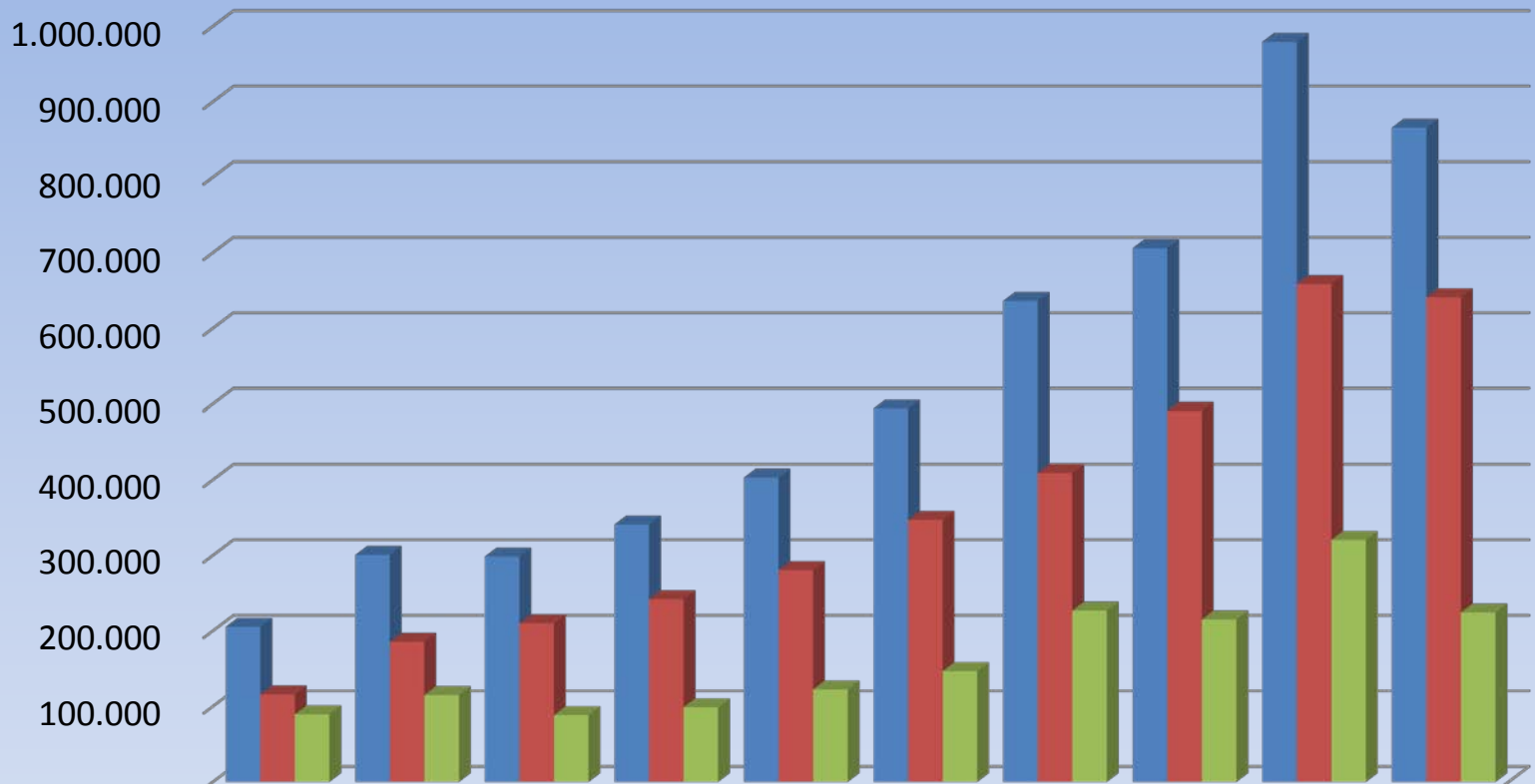
Tahun 2007 :

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2007 menurut SiAP adalah sebesar Rp490.988,63 miliar. sedangkan realisasi penerimaan perpajakan berdasarkan hasil pembukuan SAI pada Departemen Keuangan adalah sebesar Rp498.947,10 miliar sehingga terdapat selisih antara data SiAP dan SAI sebesar Rp7.958,48

- Piutang Pajak sebesar Rp42.042,10 miliar yang disajikan dalam LKPP Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya
 - Nilai Piutang Pajak yang disajikan dalam laporan keuangan tingkat Kanwil sebesar Rp34.528,16 miliar dan tingkat DJP sebesar Rp32.750,22 miliar menunjukkan bahwa nilai Piutang Pajak yang tersaji dalam *laporan keuangan DJP disajikan understated sebesar Rp1.774.959,70 juta.*

Sumber : Audit BPK terhadap LKPP 2007 dan 2008

Realisasi Penerimaan APBN, Pajak vs Non Pajak (Rp miliar)



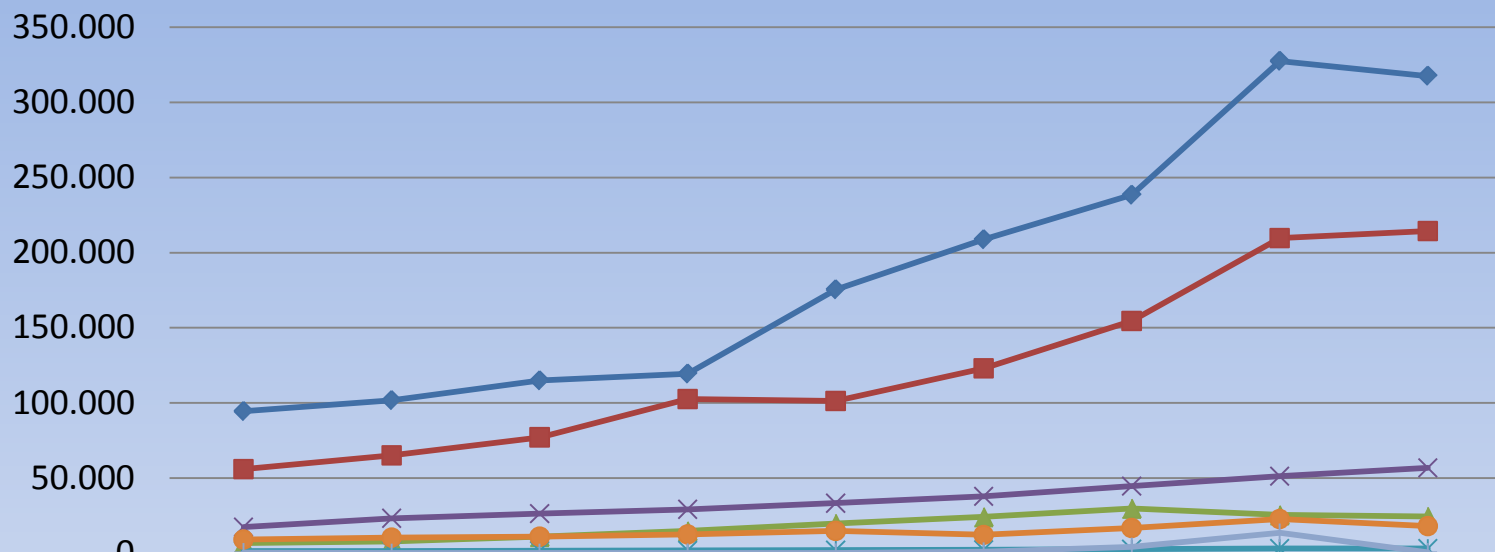
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total Penerimaan DN	205.	300.	298.	340.	403.	493.	636.	706.	979.	865.
Penerimaan Perpajakan	115.	185.	210.	242.	280.	347.	409.	490.	658.	641.
Penerimaan Bukan Pajak	89.4	115.	88.4	98.8	122.	146.	226.	215.	320.	224.

■ Total Penerimaan DN

■ Penerimaan Perpajakan

■ Penerimaan Bukan Pajak

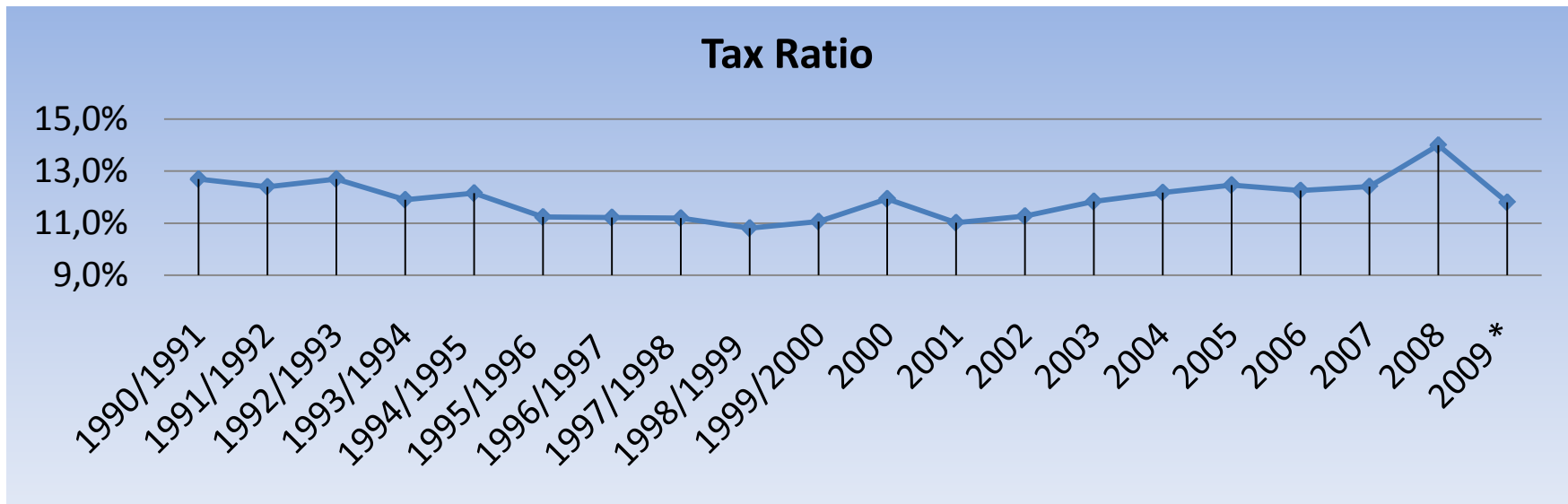
Perkembangan Penerimaan Per Jenis Pajak 2001 - 2009 (Rp miliar)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PPh	94.576	101.874	115.016	119.515	175.541	208.833	238.431	327.498	317.575
PPN	55.957	65.153	77.082	102.573	101.296	123.036	154.527	209.647	214.348
PBB	6.663	7.828	10.905	14.685	19.649	24.043	29.677	25.354	24.272
Cukai	17.394	23.189	26.277	29.173	33.256	37.772	44.680	51.252	56.719
Pajak Lainnya	1.384	1.469	1.654	1.872	2.050	2.287	2.738	3.034	3.115
Bea Masuk	9.026	10.344	10.885	12.444	14.921	12.140	16.699	22.764	18.108
Pajak Ekspor/Bea Keluar	541	231	230	298	318	1.091	4.237	13.578	563

◆ PPh ■ PPN ▲ PBB × Cukai * Pajak Lainnya ● Bea Masuk + Pajak Ekspor/Bea Keluar

Perkembangan Penerimaan Pajak VS PDB (Rp miliar)			
Tahun	Pajak	PDB	Tax Rasio (%)
2001	185.540,9	1.684.280,0	11,0%
2002	210.087,5	1.863.275,0	11,3%
2003	242.048,2	2.045.853,0	11,8%
2004	280.558,8	2.303.031,0	12,2%
2005	347.031,2	2.784.960,4	12,5%
2006	409.203,0	3.338.195,7	12,3%
2007	490.988,6	3.957.403,9	12,4%
2008	658.700,8	4.954.028,9	14,0%
2009	622.489,5	5.275.883,0	11,8%



Perbandingan Indikator Pajak

Tahun	2002	2003	2004	2005
PDB (Rp triliun)	1.863,28	2.045,85	2.303,03	2.784,96
WP Terdaftar	3.053.934	3.457.734	3.845.171	4.206.762
Tax Ratio (%)	11,3%	11,8%	12,2%	12,5%

Tahun	2006	2007	2008	2009
PDB (Rp triliun)	3.338,20	3.957,40	4.954,03	5.295,34
WP Terdaftar	4.668.458	6.694.236	10.700.000	15.910.000
Tax Ratio (%)	12,3%	12,4%	14,0%	11,8%

Sumber : Audit BPK, Depkeu. TA 2009 (unaudited)

- Dari indikator umum pajak, maka selama tahun 2002-2009 ;
 - Pendapatan Domestik Bruto mengalami kenaikan dari Rp.1.863 triliun (2002) menjadi Rp.5.295 triliun (2009) atau naik 2,8 kali (harga yang berlaku).
 - Dari sisi jumlah wajib pajak pribadi dan badan (WP) yang terdaftar pada Dirjen Pajak, terjadi kenaikan yang sangat dratis dari 3.053.934 WP (2002) menjadi 15.500.000 (2009). Atau mengalami kenaikan 5 kali lipat dalam 8 tahun.
 - Dari sisi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio), ternyata tidak menunjukkan kenaikan yang berarti. Bahkan untuk realisasi tahun 2009 tax ratio mengalami penurunan 2,2% dibandingkan tahun 2008 menjadi 11,8%.

Piutang Pajak (LKPP)			
Tahun	2006	2007	2008
Direktorat Jenderal Anggaran		187.733.156.816	53.788.164.621
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	3.173.894.545.965	9.947.769.397.769	10.318.356.917.933
Direktorat Jenderal Pajak	32.280.657.580.871	31.906.597.010.360	45.173.077.395.398
Total Piutang Pajak	35.454.552.126.836	42.042.099.564.945	55.545.222.477.952

Sumber : Audit BPK, Depkeu

- Selama tahun 2004 – 2008 berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat hasil audit BPK ternyata terjadi kenaikan dalam jumlah Piutang Pajak Negara, dari Rp.28,964 T (2004) menjadi Rp.55,545 T (2008)
- Piutang pajak negara pada Dirjen Pajak sendiri, dari Rp.32,280 T (tahun 2006) menjadi Rp.45,173 T (tahun 2008), dan pada tahun 2009 naik menjadi Rp.49,999 T.

Piutang Pajak Per Jenis Pajak

No	Jenis Piutang	LKPP 2008	LKPP 2009
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.229.968.846.712	951.534.554.486
2.	Piutang PPh Pasal 22	104.120.004.440	489.840.716.690
3.	Piutang PPh Pasal 23	3.054.716.319.783	1.688.528.889.756
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.006.960.630.021	1.053.689.834.133
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	16.268.284.571.207	16.424.024.121.140
6.	Piutang PPh Pasal 26	125.143.589.474	1.586.493.805.101
7.	Piutang PPh Final	922.916.307.676	535.862.689.996
8.	Piutang PPh Non Migas Lainnya	95.145.000	-
9.	Piutang PPN Dalam Negeri	12.560.346.602.995	14.533.638.585.793
10.	Piutang PPN Impor	-	-
11.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	280.039.959.243	280.485.129.787
12.	Piutang PBB Pedesaan	746.285.302.993	1.327.539.551.495
13.	Piutang PBB Perkotaan	4.527.189.629.491	7.542.885.445.040
14.	Piutang PBB Perkebunan	212.754.667.994	474.394.030.911
15.	Piutang PBB Kehutanan	477.992.946.905	492.606.633.014
16.	Piutang PBB Pertambangan	64.058.196.664	158.566.341.854
17.	Piutang BPHTP	803.339.377.782	179.947.361.649
18.	Piutang PTLL	815.162.918	16.386.067.497
19.	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.788.050.134.100	2.263.304.065.654
	Jumlah	45.173.077.395.398	49.999.727.823.996

Perkembangan Penyidikan Pidana Pajak Pada DJP, 2007 - 2009

	2007	2008	2009	Total
1 Berkas telah P-19	0	24	19	43
Kerugian Negara (Rp)	0	1.412.104.112.198	162.898.277.662	1.575.002.389.860
Tersangka	0	13	16	29
2 Berkas telah P-21	17	11	24	52
Kerugian Negara (Rp)	514.021.266.821	131.197.234.366	329.232.488.930	974.450.990.117
Tersangka	21	11	18	50
3 Berkas Sudah Divonis	8	13	18	39
Kerugian Negara (Rp)	100.109.271.105	463.581.880.395	288.999.575.768	852.690.727.268
Denda Pidana	6.878.943.183	115.009.117.801	633.371.034.552	755.259.095.536
Terdakwa	9	17	14	40

Sumber : Laporan DJP 2009

Statistik Pengadilan Pajak (Sumber: sekretariat pengadilan pajak Depkeu)

No	Jenis Putusan	Tahun							
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Jumlah Berkas	2.120	3.083	4.423	4.821	5.162	7.594	10.781	14.473
1	Permohonan banding/gugatan dikabulkan seluruhnya	346	519	783	991	863	1.264	1.540	1.892
	% terhadap jumlah putusan	27	33	35	33	36	39	41	
2	Permohonan banding/gugatan dikabulkan sebagian	210	218	428	495	586	600	736	912
	% terhadap jumlah putusan	16	14	19	17	24	19	20	
3	Keputusan terbanding/tergugat dibatalkan	12	67	207	637	100	119	114	33
	% terhadap jumlah putusan	1	4	9	21	4	4	3	
4	Permohonan banding/gugatan ditolak	162	220	240	304	318	406	751	880
	% terhadap jumlah putusan	13	14	11	10	13	13	20	
5	Permohonan banding/gugatan Tidak Dapat Diterima (secara formal)	543	554	549	545	536	843	627	887
	% terhadap jumlah putusan	42	35	25	18	22	26	17	

Dari Kasus yang diterima, Putusannya :	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dikabulkan (seluruhnya atau sebagian)	556	737	1211	1486	1449	1864	2276	2804
Keputusan DJP Dibatalkan	12	67	207	637	100	119	114	33
Gugatan WP Ditolak	162	220	240	304	318	406	751	880
Total Kasus Yang diproses dan diputus	730	1024	1658	2427	1867	2389	3141	3717
Total yang diputus	718	957	1451	1790	1767	2270	3027	3684
	77,44%	77,01%	83,46%	83,02%	82,00%	82,11%	75,19%	76,11%
Putusan DJP Kalah (sebagian/seluruhnya)	568	804	1418	2123	1549	1983	2390	2837
% DJP Kalah	77,8%	78,5%	85,5%	87,5%	83,0%	83,0%	76,1%	76,3%

Lampiran

Modus Rekayasa Pajak

- Adanya keinginan dari WP untuk mengurangi beban kewajiban pajaknya pada negara;
 - “Rekayasa” baik secara legal maupun ilegal
- Modus Rekayasa pajak :
 - Melaporkan pendapatan/penerimaan lebih rendah dari sebenarnya
 - Melaporkan beban usaha/produksi lebih tinggi dari sebenarnya
 - Sehingga pada akhirnya jumlah beban pajak menjadi lebih rendah dari seharusnya

Menilai Kewajaran Pajak

Latar Belakang :

- Badan-badan usaha yang merupakan group yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kepemilikan atau penguasaan pihak yang sama, dengan kata lain mempunyai hubungan istimewa (*related parties*).
- Terjadinya transaksi antara/sesama group perusahaan (*related parties*); penjualan barang-barang, pemberian jasa-jasa, pemberian hak paten dan pengetahuan tertentu, pemberian pinjaman dan lain-lain.
- Harga yang diperhitungkan pada transaksi antara anggota group tersebut sering kali tidak sama dengan harga yang berlaku di pasaran bebas, atau dengan perkataan lain telah terjadi penentuan harga yang tidak wajar (*non arm's length price*).

Dampak dari kondisi ini :

- Berkurangnya kewajiban pajak perusahaan (penghindaran pajak)
- Dalam hal perusahaan tambang akan berdampak juga kepada berkurangnya kewajiban perusahaan terhadap PNB (royalti/DHPB)

Kesimpulan :

Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak antara lain melalui penentuan harga yang tidak wajar, dalam perundang-undangan perpajakan telah terdapat ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk melakukan koreksi terhadap transaksi yang tidak wajar dengan pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa (UU PPh, UU PPN) www.antikorupsi.org

Pemeriksaan kewajaran Pajak

- Oleh karena itu dalam pemeriksaan pajak untuk menghitung berapa sebenarnya pajak terhutang atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) terutama antara Wajib Pajak Dalam Negeri (Indonesia) dengan Wajib Pajak (pihak) yang berkedudukan di Tax haven Countries (Negara yang memungut pajak lebih rendah dari Indonesia), Pemeriksa perlu menentukan harga yang wajar (*arm's length price*) atas transaksi-transaksi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - Penentuan harga barang;
 - Penentuan imbalan atas jasa, imbalan karena penggunaan harta atau hak;
 - Perhitungan pembebanan biaya tidak langsung yang dialokasikan dari kantor pusatnya, seperti biaya pengawasan, administrasi/sekretariat, perencanaan dan sebagainya;
 - Penentuan besarnya bunga pinjaman.

Menentukan kewajaran harga

- Penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPP (surat setoran pajak) melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode tidak langsung, yang antara lain dikenal beberapa metode seperti berikut ini :
 - Metode harga pasar sebanding (Comparable uncontrolled price method);
 - Metode harga jual minus (Sales minus/Resale price method);
 - Metode harga pokok plus (Cost plus method);
 - Metode lainnya yang dapat diterima.

DAFTAR RINCIAN PIUTANG PAJAK DIUSULKAN PENGHAPUSAN, PENGHAPUSAN, DALUWARSA, DAN KEBERATAN/BANDING, 31 Des 2009

NO	NAMA KANWIL	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG	PIUTANG DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN	PIUTANG DIHAPUSKAN	UPAYA HUKUM
1	Nanggroe Aceh Darussalam	282.045.810.848	16.946.931.000	15.364.504.000	1.294.271.000	8.987.228.000	31.914.602.100
2	Sumatera Utara I	1.232.620.327.607	304.357.401.475	89.248.401.534	519.348.458	2.902.340.691	110.453.647.548
3	Sumatera Utara II	245.686.808.679	16.165.461.474	6.031.867.226	0	1.205.944.401	72.668.083.966
4	Riau dan Kepulauan Riau	1.589.926.555.208	33.134.960.000	13.087.510.000	0	0	209.927.102.768
5	Sumatera Barat dan Jambi	444.913.485.749	45.322.154.000	41.184.080.000	544.244.000	163.423.471	30.932.519.276
6	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	742.937.663.955	41.499.803.000	35.087.988.000	1.488.721.111	424.996.189	188.668.195.945
7	Bengkulu dan Lampung	423.760.377.986	20.929.504.662	20.929.504.662	3.932.035.674	624.501.568	10.446.369.396
8	Jakarta Pusat	4.874.035.504.234	982.389.559.000	353.486.079.000	7.581.395.000	25.355.297.000	2.060.071.798.223
9	Jakarta Barat	1.423.365.298.587	105.994.594.000	0	0	0	161.622.299.591
10	Jakarta Selatan	4.667.275.122.989	567.677.092.000	459.980.172.000	171.688.994.000	38.957.251.000	952.012.102.570
11	Jakarta Timur	1.404.079.529.000	164.983.805.000	164.983.805.000	0	0	219.267.290.613
12	Jakarta Utara	3.177.898.000.645	32.580.749.206	20.170.703.353	354.909.524	2.165.940.970	1.596.302.227.062
13	Jakarta Khusus	6.209.721.707.347	2.682.487.302.811	7.047.422.954	13.668.020.351	28.223.224.054	4.015.537.751.102
14	Banten	1.005.226.710.111	55.459.073.030	55.459.073.030	22.531.024.671	22.531.024.671	295.521.712.888
15	Jawa Barat I	2.027.218.054.789	287.809.141.486	137.138.841.352	0	739.241.387	378.178.506.396
16	Jawa Barat II	1.707.739.644.041	423.283.151.000	97.394.750.000	12.446.041.000	21.186.567	235.078.744.512
17	Jawa Tengah I	935.427.222.905	124.816.919.666	46.157.365.591	5.163.478.101	5.519.926.421	176.161.338.453
18	Jawa Tengah II	465.982.021.830	120.656.004.000	38.836.932.000	1.841.190.000	1.388.014.000	24.983.174.913
19	Daerah Istimewa Yogyakarta	211.765.100.154	856.384.838	856.384.838	441.881.846	962.486.113	7.637.791.958
20	Jawa Timur I	1.185.289.394.778	13.440.754.275	13.440.754.275	4.780.663.275	23.599.592.160	117.737.541.904
21	Jawa Timur II	628.692.123.266	73.085.904.438	25.671.112.674	4.428.179.252	5.129.250.200	150.409.207.667
22	Jawa Timur III	560.352.729.000	8.721.510.189	6.719.020.189	2.404.403.070	3.351.450.571	32.116.724.442
23	Kalimantan Barat	297.671.993.202	16.900.129.409	12.446.515.936	0	0	5.819.944.605
24	Kalimantan Selatan dan Tengah	609.823.214.316	83.856.442.000	62.221.125.000	5.895.343.000	13.010.982	161.128.453.536
25	Kalimantan Timur	1.211.638.395.473	114.381.586.805	98.245.008.216	0	18.556.000	230.660.854.453
26	Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	513.924.017.617	26.939.947.441	26.700.429.441	1.652.223.043	1.022.571.326	99.199.604.869
27	Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku	346.927.938.187	82.683.279.759	59.029.004.132	1.457.591.963	9.490.649.468	21.086.682.907
28	Bali	621.437.072.269	24.990.550.984	20.797.797.997	1.024.702.223	0	111.640.400.486
29	Nusa Tenggara	251.132.845.625	38.348.292.090	31.380.076.793	0	3.030.901.078	4.371.474.481
30	Papua dan Maluku	606.265.881.000	64.948.501.528	64.948.501.528	83.835.887	0	37.076.289.352
31	Wajib Pajak Besar	10.094.947.272.600	616.240.351	616.240.351	0	0	5.938.155.613.637
	TOTAL	49.999.727.823.996	6.576.263.130.917	2.024.660.971.072	265.222.496.449	185.828.008.288	17.686.788.051.619

Daftar Rincian Piutang Pajak Per Kanwil dan Umur Per 31 Desember 2009

NO	KANWIL DJP	S.D. 1 THN	> 1 S.D. 2 THN	>2 S.D. 3THN	>3 S.D. 4 THN	>4S.D 5 THN	> 5 TH	JUMLAH
1	NAD	62.709.032.172	69.239.362.666	27.866.025.542	22.569.890.131	21.886.612.992	77.774.887.345	282.045.810.848
2	SUMUT I	224.006.297.350	132.015.497.224	177.261.946.358	149.715.349.126	117.608.382.815	432.012.854.734	1.232.620.327.607
3	SUMUT II	63.267.392.532	47.161.326.879	17.657.871.043	26.347.189.253	26.656.142.887	64.596.886.086	245.686.808.679
4	RIAU DAN KEPRI	461.911.515.005	231.692.086.823	177.082.885.804	180.371.573.872	118.404.230.617	420.464.263.087	1.589.926.555.208
5	SUMBAR JAMBI	74.817.326.214	52.851.275.593	36.804.859.589	30.540.630.323	33.286.258.021	216.613.136.009	444.913.485.749
6	SUMSEL BABEL	165.912.790.525	74.641.053.940	122.585.933.010	102.092.922.120	55.394.494.970	222.310.469.390	742.937.663.955
7	BENGKULU	57.209.206.299	44.972.596.641	23.165.495.737	26.724.999.895	39.791.546.503	231.896.532.911	423.760.377.986
8	JKT PUSAT	1.439.064.009.886	728.885.793.306	354.989.183.401	391.248.097.092	157.605.529.076	1.802.242.891.473	4.874.035.504.234
9	JKT BARAT	228.341.578.744	207.321.487.095	86.517.399.322	124.419.136.385	146.340.180.227	630.425.516.815	1.423.365.298.587
10	JKT SELATAN	770.270.537.383	506.861.061.987	340.369.618.302	447.501.721.497	508.334.856.334	2.093.937.327.485	4.667.275.122.989
11	JKT TIMUR	320.189.888.478	153.385.296.535	180.268.923.545	104.833.752.979	88.714.195.988	556.687.471.475	1.404.079.529.000
12	JKT UTARA	1.970.529.983.115	262.687.673.122	177.806.373.039	171.786.256.558	108.161.334.733	486.926.380.078	3.177.898.000.645
13	JKT KHUSUS	2.259.740.560.340	448.572.921.611	195.230.978.100	809.917.663.140	433.870.931.648	2.062.388.652.508	6.209.721.707.347
14	BANTEN	310.163.051.488	235.631.973.858	90.867.115.534	93.805.461.635	70.760.090.102	203.999.017.494	1.005.226.710.111
15	JAWA BARAT I	658.210.655.532	221.994.394.472	206.396.140.581	147.394.705.544	226.466.561.578	566.755.597.082	2.027.218.054.789
16	JAWA BARAT II	467.644.989.602	197.824.137.811	202.691.565.598	170.116.284.301	168.399.055.481	501.063.611.249	1.707.739.644.041
17	JAWA TENGAH I	171.633.874.052	172.834.772.529	104.837.605.844	96.194.351.122	131.518.045.456	258.408.573.902	935.427.222.905
18	JAWA TENGAH II	70.504.674.487	52.041.041.814	47.763.037.297	31.074.714.248	36.816.681.354	227.781.872.630	465.982.021.830
19	DIY	44.218.377.634	36.627.328.839	26.598.963.003	14.923.422.833	18.181.578.884	71.215.428.961	211.765.100.154
20	JATIM I	237.091.416.261	176.381.891.649	167.013.925.057	120.877.958.180	86.536.593.010	397.387.610.621	1.185.289.394.778
21	JATIM II	175.109.706.234	129.682.836.242	48.935.945.494	35.873.426.160	28.016.516.674	211.073.692.462	628.692.123.266
22	JATIM III	88.230.639.030	74.287.993.260	67.395.309.872	67.873.950.154	63.404.063.479	199.160.773.205	560.352.729.000
23	KALBAR	70.259.694.202	32.858.678.000	13.155.689.000	20.418.835.000	32.108.415.000	128.870.682.000	297.671.993.202
24	KALSELTENG	85.410.419.062	88.342.090.982	70.783.715.837	58.960.190.986	77.516.702.662	228.810.094.787	609.823.214.316
25	KALTIM	249.213.555.209	227.917.525.673	73.242.225.223	225.871.736.209	124.181.077.754	311.212.275.405	1.211.638.395.473
26	SULSELBARTRA	117.631.061.617	89.596.786.833	46.496.056.874	41.175.818.981	32.885.221.683	186.139.071.629	513.924.017.617
27	SULUTTENG GORMALUT	57.157.965.649	59.285.300.332	23.903.359.000	24.997.080.473	26.657.997.426	154.926.235.307	346.927.938.187
28	BALI	201.153.151.154	80.904.120.285	92.093.924.917	59.714.697.451	36.380.097.220	151.191.081.241	621.437.072.269
29	NUSRA	39.258.810.074	44.287.132.097	21.585.056.442	32.827.748.132	21.124.898.297	92.049.200.583	251.132.845.625
30	PAPUA DAN MALUKU	34.196.747.000	77.274.249.000	46.058.883.000	44.937.238.000	47.966.714.000	355.832.050.000	606.265.881.000
31	WAJIB PAJAK BESAR	1.992.830.068.000	3.602.017.291.000	0	813.766.968.000	247.750.328.000	1.830.120.937.000	1.608.461.680.600
	TOTAL	13.167.888.974.329	8.560.076.978.097	4.081.192.979.365	4.122.857.129.779	4.915.095.943.870	15.152.615.818.556	49.999.727.823.996

Sekian & Terimakasih